LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /418.08/2024
TANGGAL : - - 2024

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2025 telah diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) serta merupakan pedoman/arahan untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 dan diharapkan sumbang saran semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan dokumen ini di masa mendatang.

Pada akhirnya kami berharap dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, - - 2024
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI

M. NIZAM SUBEKHI
NIP. 19750701 199412 1 001

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR ……		i
DAFTAR ISI …..……		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang ……..……	1
1.2	Landasan Hukum……..……	7
1.3	Maksud dan Tujuan ……..……	11
1.4	Sistematika Penyusunan ……..…….	11
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	15
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	15
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	24
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	26
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD.....	30
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	39
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	40
3.3	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	48
BAB V	PENUTUP	52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana untuk mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah serta dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. RENSTRA PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

RENSTRA Dinas Perhubungan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dapat mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2021- 2026 melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan persiapan penyusunan rancangan Renstra Perangakat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

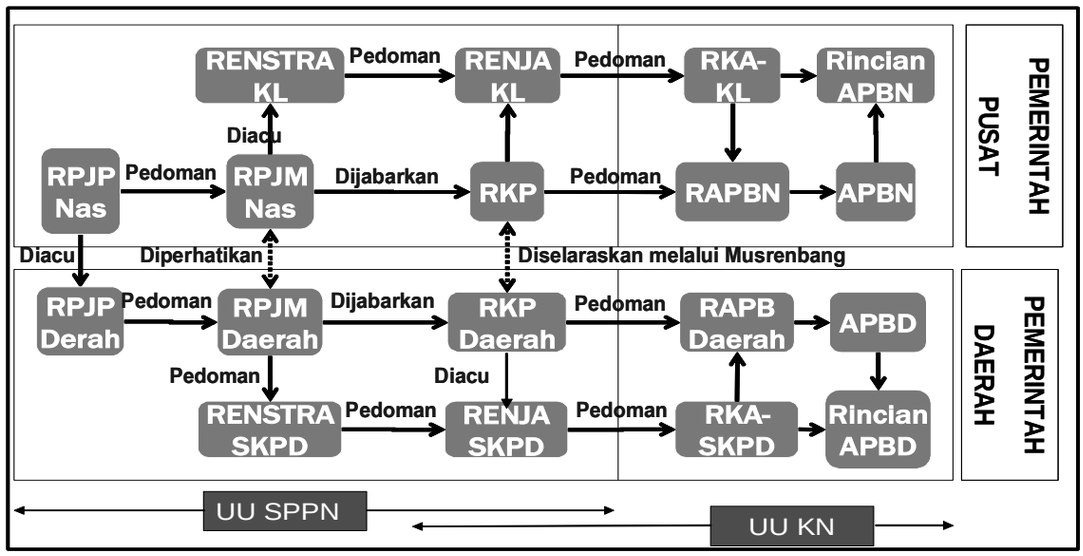
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022- 2026 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Kediri yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2022 – 2026 sertta meengacu kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi jawa Timur. Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjabarkan dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan di implementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisassi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta dilengkapi dengan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 masuk pada tahap ke 4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005 -2025 dengan sasaran pokoknya yaitu pemantapan ketertiban, keamanan dan ketentraman serta terciptanya iklim inovasi daya saing daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari pelaksanaan

periodisasi RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 khususnya serta kebijakan urusan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri.

Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dengan dokumen perencanaan tahunan (Renja) merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Posisi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1 sebagai berikut;

Diagram 1.1 : Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



Gambar 1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, RenstraK/L, Renstra Propinsi. Dan Renja PD

Proses penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 didasarkan pada forum musyawarah antar bidang sebagai pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tercantum pada rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, program-program pembangunan di bidang perhubungan dituangkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum di bidang perhubungan, berupa prioritas dan plafon anggaran sementara.

Adapun RENJA tersebut mempunyai fungsi pokok :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana di bidang perhubungan untuk menyusun program dan kegiatan, karena memuat arah kebijakan pembangunan di bidang perhubungan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun usulan anggaran kegiatan di bidang perhubungan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena memuat komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pendanaan yang menunjang pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan setiap program dalam RENJA diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip untuk mewujudkan *Good Governance dan*

Good Corporate Governance untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat/ swasta dalam proses dan implementasi kebijakan di bidang perhubungan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 guna mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Pembentukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dilatar belakangi adanya penyerahan sebagian urusan bidang lalu lintas dang angkutan jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang LLAJ kepada Dati I dan Dati II. Sehubungan dengan itu pada tahun 1997 dibentuklah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD)

Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan sebagai dampak krisis multi dimensi yang berkepanjangan, maka tercetuslah era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan paradigma baru dari pola *sentralisasi* menjadi *desentralisasi* atau yang lebih popular dengan sebutan *Otonomi Daerah.* Berkaitan dengan semakin bertambahnya kewenangan yang ditangani oleh Dinas DLLAJD serta konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka diadakan perubahan nomenklatur kelembagaan dari Dinas LLAJD menjadi Dinas Perhubungan.

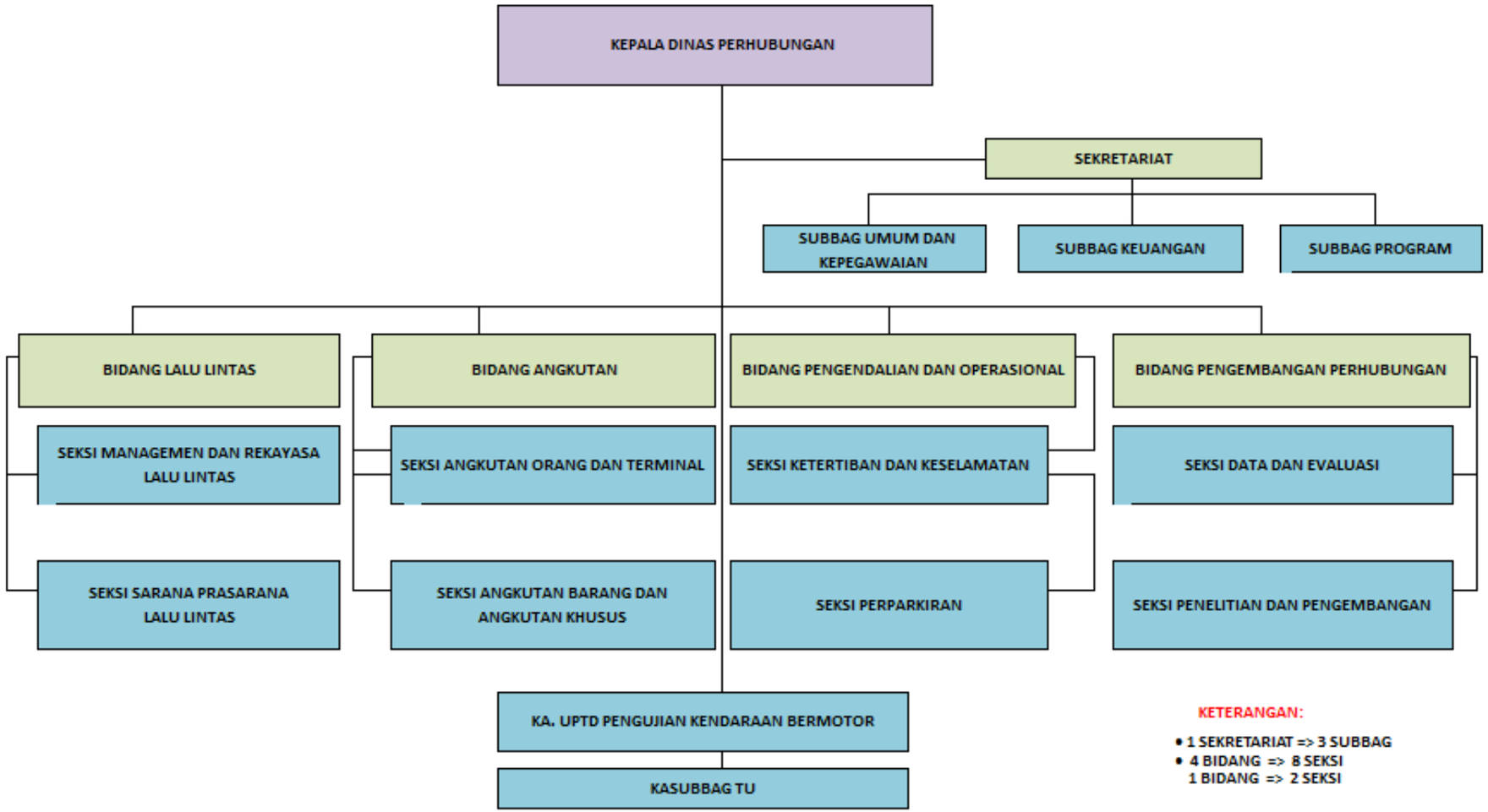
Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 dibentuk susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat , terdiri dari :
    1. Kepala Sub Bagian Program;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
    3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
    1. Kepala Bidang
    2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;

d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
    1. Kepala Bidang;
    2. Seksi Angkutan Orang dan Terminal;
    3. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;
e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari:
    1. Kepala Bidang;
    2. Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan;
    3. Kepala Seksi Perparkiran.
f. Bidang Pengembangan Perhubungan, terdiri dari:
    1. Kepala Bidang;
    2. Kepala Seksi Data dan Evaluasi;
    3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
    1. Kepala UPTD
    2. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :



Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bahwa *Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok **:** "Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan".

b) Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan;
6. Pembinaan penyelenggaran di bidang perhubungan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri per 1 Januari 2025 berjumlah 90 orang, yang dipilih berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, nampak pada rincian berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
   - Pegawai golongan IV : 3
   - Pegawai golongan III : 25
   - Pegawai golongan II : 11
   - Pegawai golongan I : 0
   - Non PNS : 51

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
   - Pendidikan S2 : 4
   - Pendidikan S1 : 28
   - Pendidikan Diploma : 12

- Pendidikan SMA/SLTA : 43
- Pendidikan SMP/SLTP : 3
- Pendidikan SD : -

C. VISI DAN MISI

❖ VISI

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan yang jauh ke masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama, yaitu untuk mencapai kondisi *"Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)".*

Adapun Visi Bupati Kediri terpilih untuk periode Tahun 2021-2026, yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."***

❖ MISI

Selanjutnya Visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Pemerintah kabupaten Kediri. Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Perhubungan mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang kelima sebagai berikut: **"*Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah"***

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan tahun 2025;
2. Merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja serta pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP/LKPJ);
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencanaan pelaksanaan dan pengelola perencanaan kegiatan,serta pelaksanaan evaluasi kinerja;
6. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi serta komitmen antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Preangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Derah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan propgram dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
   1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
   2) Pencapaian SDGs;
   3) Pengentasan kemiskinan;
   4) Pencapaian NSPK dan SPM;
   5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   6) Pengembangan daerah terisolir dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   1) Jumlah program dan jumlah kegiatan;
   2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
   3) Total kebutuhan dana/pagu indikatof yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
d. Tabel rencana program dan kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Memuat uraian indikator program/kegiatan dan sumber pendanaan.

V. PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu bab ini melaksanakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya kajian tersebut di kaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegaitan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan

2.1.1 Capaian Rencana Kerja Tahun 2023

Capaian kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 6.488.453.701.,- dan terealisasi sebesar Rp 6.278.223.982,- sehingga realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,76 %, sedangkan capaian kinerja program dapat dinilai dari prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 97,86 % dengan capaian 97,86 %. Adapun rumus perhitungan prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah adalah (Jumlah kegiatan yang penyerapan anggaran 100% : Jumlah kegiatan yang mendukung program) X 100%. Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran Rp. 9.348.175.529,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.219.487.750,- sehingga realisasi penyerapan 98,62 % dengan capaian indikator program sebagai berikut :

1) Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ dari target 86,67% dan realisasi 98,57% sehingga capaian kinerja sebesar 113,73%.
2) Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan dari target 40% tercapai realisasi 40% sehingga capaian indikator nya sebesar 100%.
3) Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan dengan target 97 % dan realisasi 94,31 % sehingga capaian indikatornya sebesar 97,23%.

4) Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dengan target 32,86% dan realisasi 21,40% sehingga capaian indikatornya 65,12 %.

Kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Perhubungan secara umum dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi yang cukup bagus, artinya bahwa terdapat tingkat penggunaan anggaran dibawah 100 persen, namun menghasilkan keluaran (output) maupun outcome yang maksimal. Pelaksanaan capaian kinerja hasil tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja hasil/program sebesar 94,79% sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	OUTCOME		CARA HITUNG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	Σ kend yang tidak melanggar / Σ kend yg di operasi x 100 %	86,67%	98,57%	113,73%
		2	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Σ kajian th n + Σ kajian tahun n-1/Σ kebutuhan kajian x 100%	40%	40%	100%
		3	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	(Σ perlengkapan jalan yang tersedia th n + Σ penyediaan perlengkapan jalan th n-1) / Σ kebutuhan perlengkapan jalan x100%	32,86%	21,40%	65,12%
		4	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	Σ kendaraan lulus uji /Σ kendaraan yg wajib uji x 100 %	97%	94,31%	97,23%
2	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Σ realisasi anggaran dibagi Σ anggaran dikali 100%	100%	97,86%	97,86%
Capaian kinerja hasil / program tahun 2023							**94,79 %**

Adapun hasil capaian kinerja hasil/keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (Output/ Outcome)

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran			Realisasi	Capaian (%)
		Tolok Ukur	Target			
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**97,86**	**97,86**
	1 Perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah	**jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**	**10**	**dokumen**	**10**	**100**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu	3	dokumen	3	100
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	7	dokumen	7	100
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**bulan**	**12**	**100**
	1 Penyediaan gaji & tunjangan ASN	Jumlah Pemberian gaji dan tunjangan penghasilan PNS selama 1 tahun	12	bulan	12	100
	2 Penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	12	100
	5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	8	dokumen	8	100
	7 Koordinasi & penyusunan laporan keunagan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	12	dokumen	12	100
	5 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12**	**bulan**	**12**	**100**
	2 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	42	stel	42	100
	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**12**	**bulan**	**12**	**100**
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik	431	komponen	431	100
	2 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	buah	12	100
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	603	peralatan	603	100
	4 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	12	bahan	6	50
	5 Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8	jenis	8	100
	6 Penyediaan barang bacaan dn peaturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	bahan	36	100
	9 Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	30	kali keg	83	276,667
	7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**unit**	**3**	**100**
	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2	unit	2	100
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg di adakan	1	paket	1	100
	8 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12**	**bulan**	**12**	**100**
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Keluaran			Realisasi	Capaian (%)
				Tolok Ukur	Target			
		1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21	unit	44	209,5
		6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	78	unit	80	102,6
		10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	2	paket	2	100
	Rata-rata capaian kinerja keluaran program 01							*97,86*
2	***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan***			***Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas***		***86,67***	***98,57***	***113,73***
				Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembagnan bid.pengembangan		***40***	***40***	***100,00***
				Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		***32,86***	***21,4***	***65,12***
				Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan		***97***	***94,31***	***97,23***
	Rata -rata capaian kinerja program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							***94,02***
	1		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian RIJ LLAJ**	**3**	**dokumen**	**3**	**100**
		10	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian	3	dokumen	3	100,00
	2		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**jumlah pemenuhan sarpras perlengkapan jalan yang tersedia**	**115**	**unit**	**132**	**114,78**
		2	Penyediaan P{erlengkapan jalan di jalan Kjab/Kota	Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	55	unit	75	136,36
		4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara di jalan Kabupaten	60	unit	57	95,00
	4		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir**	**jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**26**	**keg**	**26**	**100,00**
		2	Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	26	keg	26	100,00
	5		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**7**	**unit**	**8**	**114,29**
		1	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah terpenuhinya kebutuhan prasarana PKB	7	unit	8	114,29
		4	Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Jumlah ketersediaan kartu uji (smart card	5.695	set	6.800	119,40
		7	Pemeliharaan sarana & prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pemenuhan peralatan pengujian yang di pelihara	15	unit	12	80,00
		10	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kegiatan monev pelayanan publik bidang perhubungan	2	kali keg	2	100,00
	6		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**	**jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**13**	**keg**	**12**	**92,31**
		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untk Jaringan Jalan Kabu[paten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN dan survey monev perlengkapan jalan	6	kali keg	8	133,33
		5	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rapat koordinasi Forum LLAJ	7	kali keg	4	57,14
	7		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**	**jumlah kegiatan Andal Lalin**	**12**	**kali keg**	**12**	**100,00**
		3	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin	Jumlah persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALLALIN) untuk jalan Kabupaten	12	kali keg	12	100,00

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Keluaran			Realisasi	Capaian (%)
				Tolok Ukur	Target			
	8	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan**	**49**	**kali keg**	**18**	**36,73**
		2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	49	kali keg	18	36,73
	9	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah**		**jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**120**	**kali keg**	**120**	**100,00**
		2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	120	kali keg	120	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Keluaran Program 02								**94,02**
CAPAIAN KINERJA KELUARAN TAHUN 2023								**94,02**
CAPAIAN KINERJA HASIL TAHUN 2023								**70**

2.1.2 Evaluasi Rencana Kerja 2023 atas Rencana Strategis

Analisis teknis untuk penyusunan rencana kerja tahun 2024 dapat dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun 2023 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2024 (perkiraan) yang disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kediri

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar										
Bidang Urusan Perhubungan										
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**							
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**	**10 dok**	**20 dok**	**10 dok**	**10 dok**	**100,00**	**5 dok**	**35 dok**	**350,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	6 dok	3 dok	**3** dok	100,00	2 dok	11 dok	**366,67**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	14 dok	7 dok	**7** dok	100,00	3 dok	24 dok	**342,86**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**24 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**12 ob**	**48 bulan**	**400,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	24 bulan	12 bulan	**12** bulan	100,00	40 ob	76 bulan	**633,33**
	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	24 bulan	12 bulan	**12** bulan	100,00	12 dok	48 bulan	**400,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	16 laporan	8 laporan	**8** laporan	100,00	8 laporan	32 aporan	**400,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	24 laporan	12 laporan	**12** laporan	100,00	12 laporan	48 aporan	**400,00**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**3 laporan**	**48 laporan**				**0 laporan**	**48**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan BMD	3 laporan	48 laporan		- -		0 laporan	48	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasikepegawaian perangkat daerah**	**95 paket**	**203 stel**	**stel 40**	**40 stel**	**100,00**	**0 stel**	**243 stel**	**255,79**
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 paket	203 stel	40 stel	**40** stel	100,00	0 stel	243 stel	**255,79**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 0							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**24 bul;an**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**12 bulan**	**48 bulan**	**400,00**
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	850 paket	24 kompone	431 kompone	**431** kompor	100,00	2 paket	457 nponen	**53,76**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1975 paket	26 peralatar	13 peralatar	**12** peralat	92,31	0 peralat	38 ralatan	**1,92**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	736 paket	24 peralatar	603 peralatar	**603** peralat	100,00	13 paket	640 ralatan	**86,96**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	20 bahan	12 bahan	**6** bahan	50,00	5 paket	31 bahan	**1550,00**
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	22 jenis	8 jenis	**8** jenis	100,00	6 paket	36 jenis	**400,00**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yg disediakan	4 bahan	72 bahan	36 bahan	**36** bahan	100,00	0 bahan	108 bahan	**2700,00**
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pemenuhan bahan material PKB (1 thn)		12 bulan				0 bulan	12 0,00	**#DIV/0!**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	30 laporan	96 kali keg	30 kali keg	**83** kali keg	276,67	60 laporan	239 kali keg	**796,67**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan kearsipan	12 ob	22 ob				0 ob	22 0,00	**183,33**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah pengadaan barang milik daerah**	**1 unit**	**17 unit**	**6 unit**	**3 unit**	**50,00**	**0 unit**	**20**	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	14 peralatar	5 peralatar	**2** peralat	40,00	0 peralat	16 ralatan	**#DIV/0!**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 paket	1 paket	**1** paket	100,00	0 paket	4 paket	**400,00**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**24 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**12 bulan**	**48 bulan**	**400,00**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	**12** bulan	100,00	12 laporan	48 bulan	**400,00**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**102 unit**	**128 unit**	**102 unit**	**127 unit**	**124,51**	**99 unit**	**354 unit**	**347,06**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	48 unit	21 unit	**44** unit	209,52	21 unit	113 unit	**389,66**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 peralata	76 peralatar	78 peralatar	**80** peralat	102,56	78 peralat	234 ralatan	**325,00**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 sarpras	4 sarpras	3 sarpras	**3** sarpras	100,00	0 sarpras	7 sarpras	**700,00**
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	*Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan LLAJ*	**80,00 %**	**20,00 %**	**40,00 %**	**40,00 %**	**100,00**	**60,00 %**	120 **%**	**150,00**
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	**90,83 %**	**14,68 %**	**32,86 %**	**21,40 %**	**65,12**	**54,79 %**	91 **%**	**100,04**
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	**87,50 %**	**79,66 %**	**86,67 %**	**98,57 %**	**113,73**	**87,08 %**	265 **%**	**303,21**
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	**98,00 %**	**95,50 %**	**97,00 %**	**94,31 %**	**97,23**	**98,00 %**	288 **%**	**293,68**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**1 dok**	**1 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**100,00**	**2 dok**	**6 dok**	**600,00**
	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	1 dok	3 dok	3 dok	**100,00**	1 dok	5 dok	500,00
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 laporan					1 laporan	1 dok	#DIV/0!
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	**jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**408 unit**	**289 unit**	**132 unit**	**132 unit**	**100,00**	**81 unit**	**502 unit**	**123,04**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	220 unit	150 unit	75 unit	75 unit	**100,00**	52 unit	277 unit	125,91
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	188 unit	139 unit	57 unit	57 unit	**100,00**	29 unit	225 unit	119,68
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**12 keg**	**16 keg**	**26 keg**	**26 keg**	**100,00**	**26 keg**	**68 keg**	**566,67**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	12 laporan	16 keg	26 keg	26 keg	**100,00**	26 laporan	68 keg	566,67
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**1 unit**	**18 unit**	**8 unit**	**8 unit**	**100,00**	**13 unit**	**39 unit**	**3900,00**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	18 unit	8 unit	8 unit	**100,00**	3 unit	29 unit	2900,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.750 dok	34600 set	5695 set	6.800 set	**119,40**	7.100 set	48.500 set	195,96

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	21 unit	12 unit	12 unit	**100,00**	10 unit	43 unit	477,78
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	2 laporan	17 kali	2 kali	2 kali	**100,00**	1 laporan	20 kali	1000,00
		Jumlah sistem informasi perhubungan yang dikembangkan		6 sistem		- sistem	**#DIV/0!**	0 sistem	6 sistem	#DIV/0!
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	**jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**11 keg**	**19 keg**	**13 keg**	**12 keg**	**92,31**	**25 laporan**	**56 keg**	**509,09**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0 laporan					18 laporan	18 keg	#DIV/0!
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa	5 keg	10 keg	7 keg	4 keg	**57,14**	3 laporan	17 keg	340,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan provinsi	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	6 keg	9 keg	6 keg	8 keg	**133,33**	4 laporan	21 keg	350,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan Andal Lalin**	**5 keg**	**12 keg**	**12 keg**	**12 keg**	**100,00**	**3 laporan**	**27 keg**	**540,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil	5 laporan	12 keg	12 keg	12 keg	**100,00**	3 laporan	27 keg	540,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah pelaksanaan kegiatan inspeksi**	**22 keg**	**87 keg**	**18 keg**	**18 keg**	**100,00**	**0 keg**	**105 keg**	**477,27**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas	22 keg	87 keg	18 keg	18 keg	**100,00**	0 keg	105 keg	477,27
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**40 laporan**	**264 keg**	**120 keg**	**120 keg**	**100,00**	**60 laporan**	**444 keg**	**1110,00**
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	40 laporan	264 keg	120 keg	120 keg	**100,00**	60 laporan	444 keg	1110,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 unit							**#DIV/0!**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perhubungan berupaya untuk selalu bersikap dan bertindak proaktif, kreatif, inovatif serta profesional sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan pelayanan publik bidang perhubungan. Disamping sebagai dinas teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi ijin trayek dan retribusi penyeberangan orang (penyebrangan sungai). Berdasarkan hal tersebut, maka gambaran analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menyesuaikan kondisi setiap tahun, dapat dijelaskan sebagaimana rincian dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri
Tahun 2021 – Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	60	65	70	86,7	86,81	84,15	86,48	86,59	86,7	86,81	Indikator Tujuan Dishub
2	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	-	Jumlah ruas jalan dg pelayanan LLAJ yang baik /jumlah ruas jalan yg di kontrol x 100 %	60	65	70	75	80	60	65	70	75	80	Indikator Sasaran Dishub
3	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	-	jml kend yang tidak melanggar / jml kend yg di operasi x 100 % (dg cat. Target yg di operasi harus sama setiap tahun)	85,83	86,25	86,67	87,08	87,5	86,24	79,66	98,57	87,08	87,5	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	-	Jumlah kajian th n + jumlah kajian tahun n-1/jumlah kebutuhan kajian x 100%	0	20	40	60	80	0	20	40	60	80	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
5	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	-	(Jml perlengkapan jalan yang tersedia th n + Jml penyediaan perlengkapan jalan th n-1) / Jml kebutuhan perlengkapan jalan x100%	3,76	11,37	32,86	54,79	77,17	3,76	14,68	21,4	54,79	77,17	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
6	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	-	Jml kendaraan lulus uji /Jml kendaraan yg wajib uji x 100 %	96	97	97	98	98	96,37	95,5	94,31	98	98	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan jika dilihat Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai dinas penghasil maka dapat digambarkan capaian kinerja pemenuhan Pendapatan Asli Daerah bidang perhubungan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2023

KODE REKENING					URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	
								(Rp)	(%)
1					2	3	4	5	6
4					**PENDAPATAN**	**13.487.035.650**	**12.628.555.650**	**858.480.000**	**93,63**
4	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**13.487.035.650**	**12.628.555.650**	**858.480.000**	**93,63**
4	**1**	**2**			**Hasil Retribusi Daerah**	**13.487.035.650**	**12.628.555.650**	**858.480.000**	**93,63**
4	**1**	**2**	**01**		**Retribusi Jasa Umum**	**13.479.525.000**	**12.621.045.000**	**858.480.000**	**93,63**
4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	10.802.090.000	10.631.610.000	170.480.000	98,42
4	1	2	01	45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.643.940.000	1.989.435.000	654.505.000	75,25
4	**1**	**2**	**02**		**Retribusi Jasa Usaha**	**7.510.650**	**7.510.650**	**0**	**100,00**
4	1	2	02	01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan	7.510.650	7.510.650	0	100,00

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2023 menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.487.035.650 yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 12.628.555.650 atau 93,63 % target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam catatan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terdapat lima masalah besar yang tengah melilit sektor transportasi darat di Indonesia saat ini, yaitu:

- Pengelolaan transportasi darat belum efisien dan efektif terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T);
- Kurangnya rasa kebersamaan dalam penggunaan transportasi darat seperti egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya;
- Masih mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas);
- Angkutan massal yang belum merata terutama diwilayah pedesaan;
- Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang di akibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportsi umum.

Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi masaal, konvensi bahan bakar fosik ke gas bahkan sudah mengarah ke sistem transportasi yang digerakkan dengan listirik dan memaksimalkan *intelegensia*

transport management (manajemen transportasi yang cerdas) sehingga menyediakan layanan inovatif terkait moda trasportasi dan manejemen lalu lintas yang berbeda.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat in masih aktual adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut;
2. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless trasport.(transportasi yang lancar);*
3. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara yang sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi;
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum perkotaan / pedesaan;
5. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi masal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, secara umum bidang trasportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan sungai dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan layanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa:

1. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
2. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Kurangnya penyediaan angkutan masal dan jaringan jalan rel;
5. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
6. Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih rendahnya ketersediaan aksessibilitas moda transportasi, (3) Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah, (4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang(ODOL), (5) Belum adanya skylift truck untuk perbaikan lampu lalu lintas, (6) Belum adanya mobil uji keliling karena luasnya wilayah Kab. Kediri, (7) Rendahnya penggunaan angkutan umum yang di indikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan banyaknya kendaraan online (grab, gojek, maxim dll).

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung visi dan misi Bupati ke.5, yaitu “Peningkatan insfrastruktur dan konektivitas antar wilayah” sedangkan dampak terhadap capain program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Development Goals)* yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik bidang perhubungan dengan merencanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja VISI/MISI Bupati maupun capaian program nasional.

Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mengoptimalkan pelyanan publik bidang perhubungan berbasis teknologi adalah adanya keterbatasan anggaran dan profesionalisme aparatur, sedangkan peluangnya masih adanya pemerataan dalam pendelegasian SDM dan budaya komunikasi yang luwes sehingga perencanaan per bidang saling terkait untuk mendukung satu tujuan.
2. Tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di Kabupaten Kediri yaitu penurunan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, serta pertambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan penggunaan transportasi sedangkan peluangnya masih tersedianya pelayanan ijin trayek dan survey load factor yang bisa menjadi dasar penentuan permintaan masyarakat terhdap angkutan.
3. Tantangan untuk mendukung mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu belum memiliki jaringan trayek yang terpadu antar moda, intra moda ataupun multi moda dan semakin berkembangnya kemajuan daerah, sedangkan peluangnya tersedianya SPM pelayanan di UPTD PKB yang cukup memadai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan urusan pelayanan di sektor perhubungan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya dan isu-isu di tingkat nasional maupun propinsi maka ada beberapa isu penting (isu strategis) bidang perhubungan yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, meliputi:
   a. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Kertosono-Kediri (jalan tol Kediri – Nganjuk) yang menghubungkan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk;
   b. Jalan Tol Batu – Kediri;
   c. Jalan Se-Lingkar Wilis;
   d. Rencana jalan lingkar Ibu Kota Kabupaten (IKK);
   e. Akses Jalan Ibu Kota Kabupaten (IKK)
   f. Akses menuju Kawasan Bandara Kediri;
   g. Akses transportasi terhadap tempat wisata;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan secara komprehensif
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional teknis bidang perhubungan, alat komunikasi, senter lalu lintas, helm, jas hujan dll;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun.
5. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender masih dipandang kecil manfaatnya sehingga belum banyak program/kegiatan yang mengakomodir kepentingan tersebut.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagi upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
7. Peningkatan peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain;

8. Peningkatan tindakan terhadap pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru.
9. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan berkelanjutan,baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
10. Tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang belum optimal;
11. Masih tingginya pelanggaran Lalu Lintas terkait Angkutan barang ODOL;
12. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
13. Belum termanfaatkannya teknologi informasi pada penyelenggaraan transportasi dengan optimal;
14. Belum terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi udara;
15. Perlunya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi berupa ATCS dan ITS;
16. Belum tercukupi pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan seperti APILL, Rambu, Marka, Guardraill dll di Wilayah Kab Kediri;
17. Masih rendahnya penyediaan Prasarana Angkutan Umum
18. Belum tersedianya angkutan umum terpadu;
19. Mengoptimalkan perencanaan dan penanganan system Transportasi yang memadai sesuai perkempangan IT.

Dari isu strategis tersebut di atas maka diperlukan strategi pembangunan sektor perhubungan dimana strategi tersebut merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan stratejik seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan sektor perhubungan, sumber daya aparatur dan dukungan stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan di ambil untuk pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota ;
2. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;
3. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab./Kota;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana Induk Jaringan Induk LLAJ;
5. Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
6. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
7. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
8. Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Andalalin;
9. Penyediaan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
12. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan berkala kendaraan bermotor
13. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

14. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

a. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025:

Tema pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika di kaitkan dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan mempunyai sasaran pokok yaitu meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terpadu, dengan arah kebijakan yaitu meningkatan kelayakan dan keamanan penyelenggaraan transportasi, angkutan penumpang dan barang.

b. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 berdasarkan rencana pembangunan daerah Tahun 2025:

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Kediri pada Tahun 2024, maka penentuan prioritas pembangunan di dasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran agar dapat dicapai selama 5 tahun kedepan dari Tahun 2022-2026.
2. Program prioritas dalam RPJMD Tahun 2022-2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan Tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2022-2026 .
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada Tahun 2025

Adapun prioritas pembangunan konektivitas di tahun 2025 berada pada misi peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan rincian program prioritas sebagai berikut: :

a. Program strategis nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono- Kediri-Tulungagung, jalan tol SUBAKRI (Sukorejo – Batu – Kediri), aksesbilitas Bandara Kediri;
b. Jaringan jalur strategis antar wilayah, pusat, sub wilayah pengembangfan wilayah Kediri sekitarnya, meliputi:
    1. Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-MaDIUN-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri);
    2. Jalan lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar);
    3. Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates);
    4. Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat);
    5. Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun;
    6. Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar);dan
    7. Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (melewati Mojo).
c. Peningkatan jaringan jalan strategis antar Kecamatan, Antar Desa dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat kami sampaikan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 terhadap rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 lebih di fokuskan kepada "***Pembangunan Infrastruktur Penunjang***",sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**8.650.128.545**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7.683.920.673**
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**	**6 dokumen**	**12.463.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**	**6 dokumen**	**8.949.900**
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	7.126.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.962.400
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	5.337.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.987.500
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**7.306.001.245**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**6.637.687.373**
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 OB	6.521.927.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 OB	6.111.203.773
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	776.593.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	520.874.900
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 dokumen	3.132.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 dokumen	2.301.400

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	4.348.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	3.307.300	
05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**253.720.000**	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**110.480.000**	
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 paket	168.720.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	75.480.000	
05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 orang	85.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	35.000.000	
06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**526.326.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**390.712.100**	
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	13.304.300	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	13.304.300	
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	204.956.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	86.319.000	
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	19.922.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	18.266.400	
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	44.297.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.962.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	20.405.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	24.919.400	
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	223.441.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	226.941.000	
07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**8 unit**	**193.644.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**4 unit**	**178.118.000,00**	
07.05	Pengadaan Mebel	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	21.052.000	Pengadaan Mebel	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5.526.000	
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.150.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.150.000	
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	157.442.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	157.442.000	
08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**189.999.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**189.999.500**	
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	189.999.500	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	189.999.500	
09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 unit**	**167.973.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 unit**	**167.973.800**	
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	69.973.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	69.973.800	
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	36.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	36.500.000	
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan**	**80,00%**	**14.516.829.403**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan**	**80,00%**	**10.637.297.001**	
			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	**77,17%**				**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan**	**77,17%**		
			Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	**87,50%**				**Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ**	**87,50%**		
			Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	**98,00%**				**Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan**	**98,00%**		
01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**		**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**2 dokumen**	**171.413.700**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**		**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**2 dokumen**	**154.736.400**	
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	115.737.100	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	106.431.400	
01.07	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	55.676.600	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	48.305.000	
02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**59 unit**	**2.433.695.059**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**77 unit**	**1.820.288.879**	
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	38 unit	1.407.923.354	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	39 unit	1.064.334.074	
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	91 unit	1.025.771.705	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	38 unit	755.954.805	
04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**4 keg**	**5.064.227.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**26 keg**	**4.748.099.250**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	26 lap	5.064.227.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	26 lap	4.748.099.250	
05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**19 unit**	**1.868.414.108**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**16 unit**	**735.552.572**	
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 unit	422.691.436	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 paket	49.440.000	
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20625 dok	618.750.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000 dok	90.000.000	
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	16 unit	696.080.072	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 unit	512.580.072	
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Lap	130.892.600	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Lap	83.532.500	
06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**10 keg**	**4.540.626.500**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**29 keg**	**2.916.963.900**	
06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18 Lap	4.389.381.600	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18 Lap	2.800.867.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	31.029.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	16.201.000	
06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	120.215.900	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	99.895.000	
07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**95%**	**33.877.800**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**5 Kegiatan**	**17.320.000**	
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	33.877.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	17.320.000	
09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**60 keg**	**404.575.236**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**45 kali keg**	**244.336.000**	
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Lap	304.575.236	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	45 Lap	44.336.000	
09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	8 unit	200.000.000	
TOTAL ANGGARAN					**23.166.957.948**					**18.321.217.674**	

Adapun rincian usulan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 terkait urusan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kediri

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				
	Rambu tiang F	Bundaran selang	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	3 unit	Prioritas kawasan Bandara
	Modul ATCS	Simpang 4 jongbiru	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	1 paket	Prioritas kawasan Bandara
	Modul ATCS	Simpang 4 gayam gurah	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	1 paket	Prioritas kebutuhan 2025
	Rambu standart	Kawasan Road Diversion 1 s/d 6	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	20 unit	Prioritas kawasan Bandara
		Simpang 4 Pranggang	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia		Permintaan pemangku kepentingan
		Simpang 4 Sumberejo	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia		
		Pasar Dermo	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia		
	Guardraill	Maron Banyakan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	6 beam	Prioritas kawasan Bandara
	Flash Light	Simpang 3 Selang	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	1 unit	Permintaan Dewan
	Flash Light	Simpang 4 Syech Mursyad Banyakan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	1 unit	Permintaan Dewan
2	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**				
	Marka Jalan	Ruas Jalan Purwoasri	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	11 titik lokasi	Permintaan Masyarakat dan Prioritas KLA
	Marka Jalan	JPL 300			
	Marka Jalan	JPL 301			
	Marka Jalan	JPL 299			
	Marka Jalan	JPL 266			
	Marka Jalan	SDN Menang			
	Marka Jalan	SDN Gogorante			
	Marka Jalan	SDN Kranggan			
	Marka Jalan	SDN Plosoklaten			
	Marka Jalan	Puskesmas Brenggolo			
	Marka Jalan	Puskesmas Pranggang			
3	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
	Angkutan Balik Mudik Lebaran Gratis	Kediri-Surabaya / Kediri-Jakarta	Jumlah Armada Angkutan Umum yang Tersedia	4 unit	Dana Pajak Rokok

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat:

Ada beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam forum SKPD. Usulan masyarakat tersebut ditujukan pada Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan di realisasikan dalam kegiatan pengadaan dan perlengkapan jalan Tahun 2023.

Tidak semua usulan kegiatan dari masyarakat di akomodir dalam rencana usulan APBD Tahun 2025, mengingat keterbatasan APBD dalam mendukung kegiatan se-Kabupaten Kediri karena itu sebagian usulan kegiatan dari masyarakat ini di seleksi sesuai prioritas dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, apabila masih merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri akan di usulkan pada tahun berikutnya yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika usulan dari masyarakat termasuk kewenangan Provinsi di usulkan ke tingkat Provinsi dengan sumber pendanaan dari anggaran APBD Provinsi, demikian juga jika usulan tersebut merupakan kewenangan Kementrian Perhubungan maka akan di usulkan ke Kementrian Perhubungan Darat dengan sumber pendanaan dari anggaran APBN.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Perhubungan pada tahun yang direncanakan (2024), serta rekapitulasi program dan kegiatan prakiraan maju Tahun 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
A.	**Keselamatan dan Keamanan**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B.	**Pelayanan Transportasi**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 -2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance*, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
	5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi	
	6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor	

	tansportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
	7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah	
C.	**Kapasitas Transportasi**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,	
	2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia	
	3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu	
	4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien.

Kementrian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni *pembangunan konektivitas trasnportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM***.** Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota yang direncanakan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah di akomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 T u j u a n

1. Meningkatkan profesionalisme SDM bidang perhubungan dan meningkatkan sikap interdependensi (saling ketergantungan) untuk mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan TUPOKSI bidang perhubungan
2. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya yang ada serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan secara adil dan merata dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
4. Mewujudkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi bidang transportasi untuk menunjang kinerja pelayanan.

3.2.2 S a s a r a n

1. Terwujudnya SDM perhubungan yang berkompetensi, bermoral, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, dan bersinergis;
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perhubungan dan berjalannya reformasi kelembagaan secara berkala;
3. Terwujudnya pelayanan jasa perhubungan ke daerah-daerah sentra produksi pertanian dan industri, daerah wisata, daerah terpencil, dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan melalui pemahaman tertib berlalulintas;
4. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan, diterapkannya analisis dampak lingkungan dalam perencanaan transportasi, dan terlaksananya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan jasa perhubungan.

3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025

Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2025 dalam proses pembuatannya memperhatikan beberapa faktor yaitu;

(1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,

Program Kegiatan Dinas Perhubungan mendukung visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, sera Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani” dan misi nomor 5 yaitu ”Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar - wilayah”, dimana bidang perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan transportasi serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Kediri.

(2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,

Standar Pelayanan Minimal pada dinas perhubungan setiap tahun dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan.

(3) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan

Guna mendukung potensi ekonomi daerah, Dinas Perhubungan membantu ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi atau pengguna jalan melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Operasional Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

(4) Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis IT bidang perhubungan yaitu dengan melaksanakan pengembangan sistem informasi bidang perhubungan berbasis IT yang dirintis dengan mengoptimalkan pengembangan E-Dishub dan SIM PKB serta peningkatan operasional ATCS.

Berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya penyesuaian terhadap penyederhanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, maka jumlah alokasi pagu anggaran pada RENJA Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.18.321.217.674,-, sebagaimana terinci dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan maju Tahun 2026
Kabupaten Kediri

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	***7.683.920.673***	APBD		**100%**	**8.650.128.545**
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**		**6 dokumen**	**8.949.900**	APBD		**6 dokumen**	**12.463.200**
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	2 dokumen	4.962.400	APBD		2 dok	7.126.000
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	4 Laporan	3.987.500	APBD		4 dok	5.337.200
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**		**12 bulan**	**6.637.687.373**	APBD		**12 bulan**	**7.306.001.245**
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	40 OB	6.111.203.773	APBD		40 OB	6.521.927.245
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 Dokumen	520.874.900	APBD		12 Dokumen	776.593.500
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	8 dokumen	2.301.400	APBD		8 dokumen	3.132.300
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	12 dokumen	3.307.300	APBD		12 dokumen	4.348.200
05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**12 bulan**	**110.480.000**	APBD		**12 bulan**	**253.720.000**
05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	85 paket	75.480.000	APBD		190 paket	168.720.000
05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	2 orang	35.000.000			85 orang	85.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**		**12 bulan**	**390.712.100**	APBD		**12 bulan**	**526.326.800**
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	8 Paket	13.304.300	APBD		8 Paket	13.304.300
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	5 Paket	86.319.000	APBD		16 Paket	204.956.100
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	15 Paket	18.266.400	APBD		16 Paket	19.922.400
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	6 Paket	20.962.000	APBD		6 Paket	44.297.400
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	9 Paket	24.919.400	APBD		9 Paket	20.405.600
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	80 Laporan	226.941.000	APBD		80 Laporan	223.441.000
07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		**4 unit**	**178.118.000**	APBD		**8 unit**	**193.644.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	2 unit	5.526.000	APBD		6 unit	21.052.000
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Wilayah Kab. Kediri	1 unit	15.150.000	APBD		1 unit	15.150.000
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wilayah Kab. Kediri	1 Unit	157.442.000	APBD		1 Unit	157.442.000
08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**		**12 bulan**	**189.999.500**	APBD		**12 bulan**	**189.999.500**
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Wilayah Kab. Kediri	12 Laporan	189.999.500	APBD		12 Laporan	189.999.500
09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**		**100 unit**	**167.973.800**	APBD		**100 unit**	**167.973.800**
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Wilayah Kabupaten Kediri	21 unit	69.973.800	APBD		21 unit	69.973.800

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	78 unit	36.500.000	APBD		78 unit	36.500.000
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wilayah Kabupaten Kediri	1 Unit	61.500.000	APBD		1 Unit	61.500.000
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang**		**80,00%**	**10.637.297.001**	APBD		**80,00%**	**14.516.829.403**
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		**77,17%**				**77,17%**	
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ		**87,50%**				**87,50%**	
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan		**98,00%**				**98,00%**	
01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**	**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**		**2 dokumen**	**154.736.400**	APBD		**2 dokumen**	**171.413.700**
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	1 dokumen	106.431.400	APBD		1 dokumen	115.737.100
01.07	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	1 Laporan	48.305.000			1 Laporan	55.676.600
02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**		**77 unit**	**1.820.288.879**	APBD		**59 unit**	**2.433.695.059**
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Wilayah Kabupaten Kediri	39 unit	1.064.334.074	APBD		38 unit	1.407.923.354
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	38 unit	755.954.805	APBD		91 unit	1.025.771.705
04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**		**26 keg**	**4.748.099.250**	APBD		**4 keg**	**5.064.227.000**
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	26 lap	4.748.099.250	APBD		26 lap	5.064.227.000
05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**		**16 unit**	**735.552.572**	APBD		**19 unit**	**1.868.414.108**
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Wilayah Kabupaten Kediri	1 paket	49.440.000	APBD		3 unit	422.691.436

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	3.000 dok	90.000.000	APBD		20625 dok	618.750.000
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	15 unit	512.580.072	APBD		16 unit	696.080.072
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	1 Lap	83.532.500	APBD		1 Lap	130.892.600
06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**		**29 keg**	**2.916.963.900**	APBD		**10 keg**	**4.540.626.500**
06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	18 Lap	2.800.867.900	APBD		18 Lap	4.389.381.600
06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	6 Laporan	16.201.000	APBD		6 Laporan	31.029.000
06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Wilayah Kabupaten Kediri	5 Laporan	99.895.000	APBD		5 Laporan	120.215.900
07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan**	**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan**		**5 Kegiatan**	**17.320.000**	APBD		**95%**	**33.877.800**
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	5 Laporan	17.320.000	APBD		5 Laporan	33.877.800
09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**		**45 kali keg**	**244.336.000**	APBD		**60 keg**	**404.575.236**
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	45 Lap	44.336.000	APBD		60 Lap	304.575.236
09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Wilayah Kabupaten Kediri	8 unit	200.000.000	APBD		4 unit	100.000.000
TOTAL ANGGARAN					**18.321.217.674**				**23.166.957.948**

Adapun gambaran pengadaan sarana prasarana lalu lintas mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari rekapitulasi pengadaan perlengkapan jalan mulai tahun 2020 (tahun 2013- tahun 2020) sampai dengan tahun 2024, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas sampai dengan 2024

No.	JENIS PENGADAAN	TAHUN PENGADAAN					TOTAL
		S/D 2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rambu Standar	1.021	21	72	60	48	1.222 unit
2	Rambu tiang F					35	35 unit
3	RPPJ	84	6	6	6	10	112 unit
4	Pengadaan Guardrail	111		6			117 beam
5	Pengadaan APILL (FA)	50	3	13	4	4	74 unit
6	Pengadaan APILL (TL)	3		1	1		5 unit
7	Pengadaan APILL (PCTL)	1					1 unit
8	Pengadaan Paku Jalan Bulat	3.163					3.163 bh
9	Pengadaan Paku Marka Solar cell	80					80 bh
10	Pengadaan CCTV	22		4	8	7	41 unit
11	Pengadaan Cermin Tikungan	47					47 unit
12	Pengadaan & Pemasangan Running Text	3					3 unit
13	Road Barier	239					239 unit
14	Pengadaan MSD	84					84 unit
15	Pengadaan Deliniator	1.626					1.626 buah
16	Pengecatan Marka	83	9	19	26		137 Titik lokasi
17	ATCS	3	1	1	1	4	10 unit
18	Pengadaan Monopole	4					4 unit
19	Palang Pintu KA	-		1	2	3	6 unit
20	Pos Jaga KA	-		1	2	3	6 unit

Sumber Data: Bidang Lalin (DISHUB) tahun 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana kerja dan pendanaan SKPD merupakan dokumen yang menjelaskan terkait progam / kegiatan dan pendanaan SKPD dalam satu tahun anggaran. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD selama satu tahun. Kegiatan SKPD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan prioritas guna mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang perhubungan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah Jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD.

Pelaksanaan rencana kerja berupa program/kegiatan Dinas Perhubungan sebagai instrument pelaksanaan dari program Tahun 2025 yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan serta dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi dan penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, monitoring dan evaluasi.

Efektifitas pelaksanaan program perlu dijaga dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan agar diperoleh hasil maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Perencanaan program dan kerja Dinas Perhubungan di Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi di tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan usulan masyarakat ataupun perkembangan tuntutan teknologi dan informasi di sektor tranportasi, akan tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran maka perencanaan anggaran tahun 2025 disesuaikan dengan tersedianya anggaran yang ada sehingga ada beberapa kegiatan/sub kegiatan tidak teranggarkan. Tahun 2025 jumlah program ada 2 (dua) program yang terinci dalam 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Penyebaran program terkait sarana dan prasarana lalu lintas meliputi wilayah se-Kabupaten Kediri, disamping itu juga tersebar di desa / kecamatan yang telah dilakukan kajian awal perencanaan kebutuhan sarana prasarana lalu lintas. rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana table 4.1 berikut :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.683.920.673**	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat**	**8.949.900**	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.962.400	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.987.500	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**6.637.687.373**	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.111.203.773	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	520.874.900	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.301.400	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.307.300	APBD
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**110.480.000**	APBD
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75.480.000	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**390.712.100**	APBD
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.304.300	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86.319.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18.266.400	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.962.000	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24.919.400	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.941.000	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**178.118.000**	APBD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.526.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.150.000	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	157.442.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**189.999.500**	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	189.999.500	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**167.973.800**	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69.973.800	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36.500.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61.500.000	APBD
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan**	**10.637.297.001**	APBD
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ		
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**154.736.400**	APBD
	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	106.431.400	APBD
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	48.305.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**1.820.288.879**	APBD
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.064.334.074	APBD
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	755.954.805	APBD
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**4.748.099.250**	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4.748.099.250	APBD
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**735.552.572**	APBD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	49.440.000	APBD
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000.000	APBD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	512.580.072	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	83.532.500	APBD
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**2.916.963.900**	APBD
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.800.867.900	APBD
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.201.000	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	99.895.000	APBD
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**17.320.000**	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	17.320.000	APBD
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**244.336.000**	APBD
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	44.336.000	APBD
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	200.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN			**18.321.217.674**	

Sehubungan dengan adanya fungsi sebagai dinas penghasil maka Dinas Perhubungan merencanakan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan tahun 2025 sebagaimaan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PENERIMAAN PAD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN SKPD							KET.
Kode Rekening						Uraian	Jumlah	
1						2	3	
4						**PENDAPATAN**	**21.902.392.650**	
4	**1**					**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**21.902.392.650**	
4	**1**	**02**				**Hasil Retribusi Daerah**	**21.902.392.650**	
4	**1**	**02**	**01**			**Retribusi Jasa Umum**	**21.894.882.000**	
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	21.894.882.000	
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	21.894.882.000	
4	**1**	**02**	**02**			**Retribusi Jasa Usaha**	**7.510.650**	
4	1	02	02	01		Retribusi pemakaian kekayaan daerah	7.510.650	
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah	7.510.650	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 telah di uraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2025. Pelaksanaan mekanisme pengamanan program dapat dilakukan melalui prinsip *safeguarding* (tindak pengamanan) melaui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabillitas dan partisipasi/peran serta masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyebaran informasi, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pembentukan unit pengaduan masyarakatat dan prinsip partisipasi di operasionalkan melalui penyelenggaraan forum lintas pelaku (pemerintah dan masyarakat) guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang lebih luas,sehingga diperlukan produk kebijakan atau peraturan perundangan yang khusus di buat untuk mendukung *safeguarding*.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien serta disesuaikan rencana realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Kediri, - - 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI

M. NIZAM SUBEKHI
NIP. 19750701 199412 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA